

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (*volcanic arc*) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Persoalan ini mengakibatkan wilayah Indonesia sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Sumber : (<https://bnpb.go.id>,2023) Diakses tanggal 10/01/2023 pukul 08:41 WIB. Oleh karena itu terjadinya bencana alam menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat, di antaranya timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit, hilangnya harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya fungsi psikologis para korban bencana alam. Selain itu, Indonesia juga terletak di jalur gempa bumi dan gunung berapi yang dinilai paling dahsyat oleh *United States Geological Surveys*.

Tanah longsor sering terjadi di Indonesia karena banyak terdapat gunung berapi aktif dan tidak aktif di Indonesia. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng sedangkan bencana

yaitu, Pengertian bencana alam adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang mengakibatkan adanya korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berada di luar kapasitas normal (Lia, 2022). Penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab bersama karena setiap daerah harus siap sebelum pada saat dan setelah terjadinya bencana, hal terpenting yang perlu diperhatikan masyarakat seperti pemetaan bangunan, pemetaan lapisan tanah, pemberdayaan manusia, dan penelitian lebih lanjut. Semua masyarakat bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di lingkungan sekitar (Silmi dkk., 2019).

Pada saat Indonesia memasuki musim penghujan, risiko tanah longsor kian meningkat karena sebagian besar penyebab tanah longsor di Indonesia adalah akibat hujan sangat deras di lereng gunung yang dan berkepanjangan. Pemerintah bertanggung jawab atas penanggulangan bencana, termasuk fokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Jaminan atas terwujudnya pelayanan dan keadilan hak-hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana harus segera dimintakan, yang bisa mengharapkan lebih banyak korban. Oleh karena itu pemerintah sebagai pihak melindungi masyarakatnya haruslah membuat langkah pencegahan dan penanganan yang tepat agar bencana yang terjadi dapat diatasi, salah satu diantaranya yaitu dengan membuat lembaga, badan atau organisasi yang diberikan wewenang lebih oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah banjir dengan lebih spesifik.

Berdasarkan besarnya risiko bencana Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB tidak bekerja sendiri karena besarnya penduduk Indonesia, setiap daerah memiliki badan penanggulangan bencana sendiri yang disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah

lembaga negara yang berkedudukan di luar kementerian yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana baik di wilayah provinsi maupun kabupaten/kota menurut tata cara yang ditetapkan oleh badan penanggulangan bencana. Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota, dibentuk melalui Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Sofwan, Syifa Vidya dan Octaviyanti, 2020).

Peristiwa bencana merupakan isu publik yang dihadapi masyarakat Indonesia dan merupakan salah satu negara yang kerap mengalami bencana alam. Data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) selama tahun 2021 telah terjadi terjadi 5.402 kejadian bencana, dan 99,5% dari kejadian sepanjang tahun 2021 merupakan bencana hidrometeorologi (Muhari, 2022). Isu kebencanaan merupakan isu strategis nasional yang memerlukan penanganan khusus dikarenakan bencana dapat mengancam keamanan dan keselamatan manusia hal ini perlu adanya tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya bencana. Bencana dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan seperti menghilangkan nyawa seseorang dan harta benda (Pangaribuan, 2019).

Untuk menekan jumlah korban bencana alam agar jumlah korban tidak bertambah, pemerintah membutuhkan program yang disebut Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Menurut BNPB (2018), pengurangan risiko bencana (PRB) adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menganalisis risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebelum bencana (manajemen risiko bencana, mitigasi dan persiapan), selama bencana (manajemen darurat) dan setelah bencana (manajemen pemulihan). BNPB dan dari segi keuangan

membuat Indonesia dalam keadaan krisis. Pengurangan risiko bencana mencakup hal-hal seperti manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan bencana, tetapi pengurangan risiko bencana juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar pembangunan dapat berkelanjutan, pembangunan juga harus mengurangi risiko bencana. Di sisi lain, kebijakan pembangunan yang tidak sehat meningkatkan risiko bencana dan kerugian bencana. Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, profesional dan swasta terlibat dalam pengurangan risiko bencana untuk bekerja sama. Indonesia telah mengalami banyak bencana alam. Berdasarkan data BNPB, jumlah bencana meningkat menjadi 810 orang pada tahun 2023, 118 meninggal dunia, 6 hilang, 180 luka-luka, 2.040.485 mengungsi dan luka-luka. Hal ini menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah bencana alam terbanyak di Indonesia, dengan 949 bencana terjadi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Undang-Undang No. Pasal 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dengan pasal 18 UU tersebut mewajibkan pemerintah daerah menjadi BPBD.

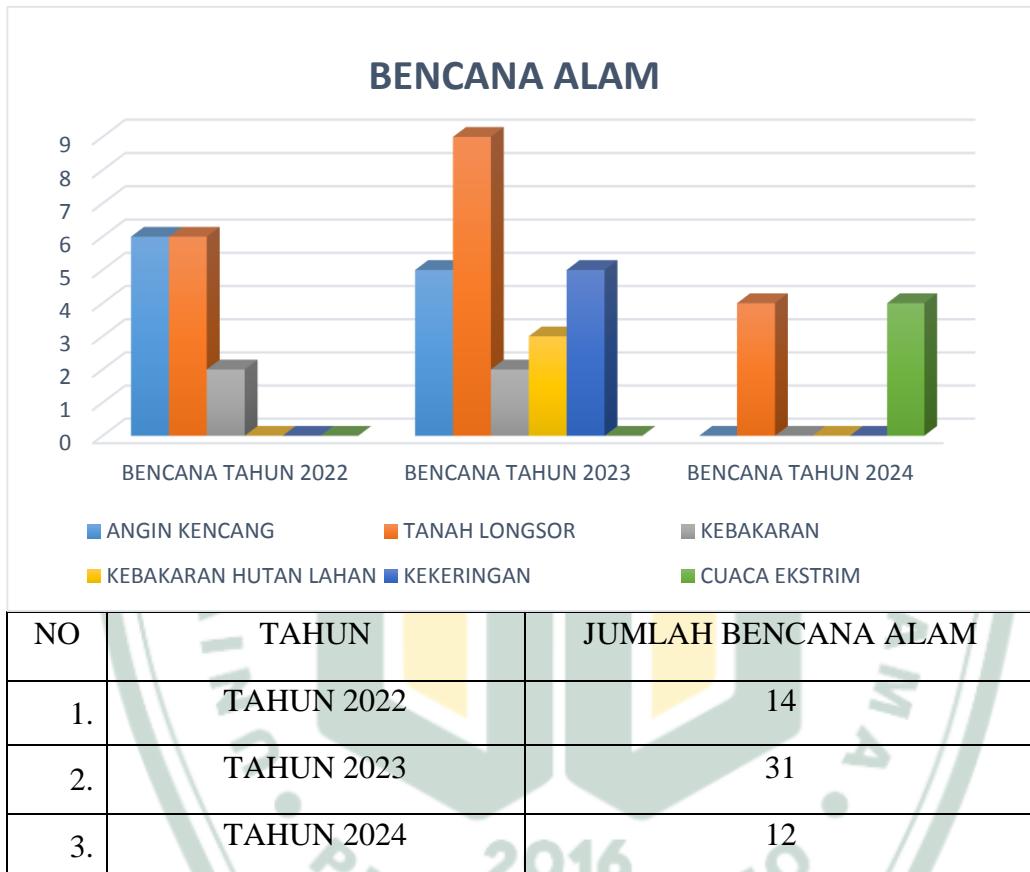
Peristiwa bencana di Kabupaten Banyumas menjadikan seluruh *stakeholder* tingkat lokal, dimana penanggulangan bencana sangat penting dan hati-hati dalam memperbaiki kinerja manajemen pada situasi bencana. Data kebencanaan tingkat Kabupaten Banyumas, Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk Kabupaten Banyumas sebanyak 250, dengan meninggal dan hilang 31 jiwa, luka-luka 35 jiwa, menderita dan mengungsi 446.697 jiwa, rumah rusak 2000 unit, rumah terendam 50.779 unit, fasilitas pendidikan 169 unit, fasilitas peribadatan 110 unit (Wahyudi, 2018). Dengan kondisi geografis Kabupaten Banyumas yang rentan dengan berbagai bencana (tanah longsor, banjir, angin topan, erupsi gunung slamet dan lain-lain). Kabupaten Banyumas termasuk daerah yang rentan bencana, untuk Tingkat Nasional termasuk dalam Rangking 36 dan

untuk Tingkat Provinsi termasuk dalam Rangking 5. Sumber. (<https://jateng.Suara.com/read/2021/09/23/122015/belasan-kecamatan-di-kabupaten-banyumas-rawan-bencana -ini-titik-yang-perlu-waspadai> dikutip 07/10/2021 pukul 21:51 WIB).

Dapat diketahui bahwa Desa Sokawera merupakan desa yang berbukit-bukit dan sering terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan kerugian harta benda namun tidak mengakibatkan kehilangan korban jiwa, berdasarkan informasi yang telah diketahui Desa Sokawera telah melakukan mitigasi bencana dengan tujuan mengurangi potensi kerugian harta benda serta merencanakan dan mengupayakan dari pencegahan hingga penanganan usai terjadinya bencana, dalam sistem pengurangan risiko bencana ini akan melibatkan berbagai *stakeholder* dan masyarakat yang terus berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya agar berjalan optimal upaya ini telah dilakukan oleh seluruh masyarakat Desa Sokawera bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas dengan terus membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) karena bencana adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat dalam pasal (25) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelengaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang berawal di Desa Sokawera lalu di Desa lain seperti Desa Gumelar, Kecamatan Gumelar dan sebelumnya, Kecamatan Cilongok. Menurut Koordinator Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas Kusworo mengungkapkan dalam sepekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di dua titik yakni Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok dan Desa Gumelar, Kecamatan

Gumelar. Pada penelitian ini berfokus pada 3 tahun terakhir yaitu 2022,2023 dan 2024 hal tersebut terlihat dari grafik di bawah ini



Gambar 1 Kejadian Bencana Alam

Sumber : Data olah peneliti

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa Desa Sokawera merupakan desa yang berbukit-bukit dan sering terjadi bencana tanah longsor yang mengakibatkan kerugian harta benda namun tidak mengakibatkan kehilangan korban jiwa namun dengan adanya peran (BPBD) sehingga berkurangnya potensi ancaman bencana tanah longsor dengan demikian risiko bencana alam sangatlah tinggi,

Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) di isi dengan berbagai materi di antaranya adalah kerja para relawan saat melakukan penanggulangan bencana, dapur umum serta penggunaan komunikasi ketika terjadi bencana. Dengan adanya peningkatan kapasitas diharapkan dapat mengurangi risiko bencana. Jika kemampuan dan kapasitas ditingkatkan maka risiko bencana akan dapat diminimalkan. Sumber: (<https://mediaindonesia.com/nusantara/203751/BPBD-bentuk-forum-pengurangan-risiko-bencana> dikutip tanggal 19/06/2021). Desa Sokawera merupakan wilayah yang berada di dataran tinggi dengan kondisi berbukit-bukit dan tebing tinggi, sehingga menyebabkanya potensi ancaman bencana tanah longsor dengan demikian risiko bencana alam sangatlah tinggi. Kondisi ini mengharuskan desa ini yang berada di Kabupaten Banyumas harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil prasurvei yang telah dilakukan bahwa menurut ketua forum pengurangan risiko bencana (FPRB) Bapak Sulis di Desa Sokawera telah banyak terjadi bencana tanah longsor yang menimbulkan banyak kerusakan dan kehilangan harta benda namun tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini menjadikan Desa Sokawera dengan kondisinya yang didominasi oleh tebing tinggi menjadikan acaman serta perlunya pengurangan risiko bencana.

Dalam berita kwarcab Banyumas pramuka peduli, Hujan deras yang mengguyur di wilayah Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas beberapa ini mengakibatkan sejumlah desa yang ada lereng Gunung Slamet bagian selatan longsor, akibatnya sejumlah warga mengalami musibah seperti yang terjadi di Desa Sokawera. Waka Abdi Masyarakat Kwaran Cilongok Kak Tasiwan mengatakan setelah mendapat informasi kepada Tim Pramuka peduli langsung mengadakan aksi berupa pembersihan material longsor. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari Sabtu-Minggu 8-9 Oktober 2022. “Ada empat titik bencana, yaitu longsorinya talud di grumbul Larangan Rt 6/4

mengakibatkan dapur milik rumah bapak Sifa yang menjabat ketua RT ambruk. Kerugian diperkirakan mencapai Rp 20 juta. Disusul ambrolnya tebing di grumbul Seliling RT 8/4 menimpa rumah bapak Suyitno kerugian diperkirakan Rp 10 juta. Lalu, tebing di grumbul Larangan RT 2/4 juga tergerus hujan mengancam rumah bapak Kamaludin kerugian sekitar Rp 10 juta rupiah, terakhir tebing curam di grumbul Wanalaba ambruk menimpa halaman rumah Mustangin RT 1/8,” jelasnya Pramuka Peduli Kwaran Cilongok bersama unsur terkait langsung melaksanakan kegiatan lanjutan yakni membersihkan material tanah yang menimpa rumah warga.

Musibah banjir dan tanah longsor kembali terjadi di Banyumas, berdasarkan catatan BPBD Banyumas, terdapat 22 titik longsor. Sedangkan banjir merendam beberapa desa di tiga kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas Budi Nugroho menyebutkan, 22 titik tanah longsor itu berada di empat kecamatan yakni di Kecamatan Karanglewas, Cilongok, Patikraja, dan Purwojati. ”Di Kecamatan Cilongok tanah longsor terjadi di Desa Jatisaba, Gunung Lurah, Sokawera, dan Panusupan. Sementara di Kecamatan Karanglewas terjadi di Desa Kediri dan Tamansari,” katanya seperti dikutip Serayunews.com, Senin (14/11/2022), Longsor ini terjadi lantaran wilayah tersebut diguyur hujan seharian kemarin (13/11/2022). Saat ini longsoran sudah dibersihkan dantidak ada korban jiwa,” ungkapnya Sementara itu, luapan banjir terjadi di beberapa titik yakni di Kecamatan Purwojati, Kecamatan Purwokerto Barat, Kecamatan Cilongok, dan Kecamatan Patikraja. ”Tapi saat ini, banjir luapan sudah surut dan warga sekitar telah kembali beraktivitas seperti sedia kala,” terangnya. Banjir di Kecamatan Purwokerto Barat, lanjutnya, terjadi di Kelurahan Karanglewas Lor, Patikraja terjadi di Desa Karangendep, Kecamatan Cilongok terjadi di Desa Jatisaba dan Kecamatan Purwojati terjadi di Desa Kaliputih, Karangtalun Lor, dan Karangtalun Kidul.

Dari peristiwa tersebut, Budi memastikan tidak ada korban jiwa dan untuk kerugian saat ini masih ada pendataan sumber:

(<https://www.murianews.com/2022/11/14/332702/banjir-dan-longsor-terjang-banyumas-ini-kata-BPBD> diakses pada tanggal 8 april 2023 pukul 21.28 WIB). Berdasarkan pantauan muria news sejumlah petugas BPBD Banyumas diterjunkan ke lokasi bencana mereka membantu warga membersihkan sisa lumpur, banjir dan tanah longsor yang menutupi rumah warga. Berdasarkan uraian di atas maka dapat terlihat Peran Vital Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyumas dalam upaya menangani bencana tanah longsor, banjir yang ada di Kabupaten Banyumas. Hal ini menjadi masalah yang sangat menarik untuk dibahas, sebab permasalahan bencana tanah longsor, banjir di Kabupaten Banyumas khususnya Desa Sokawera Kecamatan Cilongok masih sering terjadi, dengan dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tidak serta merta penanggulangan bencana dapat berjalan sebagaimana mestinya, banyak aspek penghambat tidak efektifnya suatu kebijakan ataupun kegiatan seperti minimnya sumberdaya terlatih serta sarana dan prasarana yang terbatas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diketahui bahwa penulis memfokuskan penelitian ini untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengurangi risiko Bencana Alam di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dengan menganalisis program kerja, tujuan dan manfaat meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banyumas, sebagai upaya pengurangan risiko bencana alam di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. Bertitik tolak belakang dari latar belakang masalah tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan Judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) dalam pengurangan risiko Bencana Alam di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas”.



B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang dapat disimpulkan permasalahanya yaitu:

1. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan risiko bencana alam Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pengurangan bencana Di Desa Sokawera Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

D. Manfaat Penelitian/ Urgensi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan khazanah baru dalam ilmu administrasi publik khususnya bidang pengurangan risiko bencana, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ataupun rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan menggambarkan bagaimana peran pengurangan badan penanggulangan bencana Daerah dalam pengurangan risiko bencana sangat penting dilaksanakan.